

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia peradaban tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Dari sini, ada benarnya jika sejarah umat manusia merupakan sejarah konflik. Konflik selalu terjadi di dunia. Dalam sistem sosial yang bernama Negara, bangsa, organisasi, perusahaan dan bahkan dalam sistem sosial terkecil bernama keluarga dan pertemanan, konflik terjadi di masa lalu, sekarang dan pasti akan terjadi dimasa yang akan datang.¹

Konflik bisa terjadi antara warga masyarakat dan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, konflik mengenai pertambangan emas, timah atau penggalian pasir. Di Jawa Barat, banyak pertambangan emas rakyat, gurandil, yang menggali emas di lokasi PT Aneka Tambang. Umumnya, penambang ini tidak mempunyai ijin pertambangan rakyat (IPR) dan mencemari air sungai. Disamping itu, banyak terjadi gurandil yang terkubur oleh lubang-lubang galian emas yang rontok. Pemerintah melarang mereka, tetapi para gurandil tetap melakukan penambangan. Di provinsi Bangka Belitung, rakyat melakukan penambangan timah yang tidak berizin. Penambangan ini

¹Wirawan, “*Konflik dan Manajemen Konflik*” Teori Aplikasi dan Penelitian 2013, Hal : 1. 9 Desember 2015.

menimbulkan kerusakan lingkungan karena menimbulkan rawan berupa cekungan-cekungan tanah berisi air yang membuat tanah tidak dapat direklamasi. Pertambangan ilegal selama ini di Indonesia sebenarnya bukanlah sebuah kata yang jarang dan kita dengar, atau bahkan kita bisa katakan sudah sangat marak terjadi di Indonesia dan bukan menjadi bahan pembicaraan baru lagi.²

Penambangan emas tanpa izin adalah kegiatan pertambangan yang terjadi di hampir semua daerah di Indonesia contohnya, di Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Landak dan tidak mempunyai izin alias ilegal. Kegiatan ini merupakan kegiatan penambangan secara tradisional yang biasanya dilakukan oleh masyarakat ditepi sungai. Inilah yang terjadi pada awalnya, namun sekarang hal ini bisa dilakukan dengan mesin jet maupun mesin dompeng. Bukan hanya di Jawa barat dan Kalimantan saja yang merasakan dampak dari pertambangan ilegal atau perselisihan mengenai budaya atau tanah yang berada di wilayah adat tetapi hampir di setiap daerah di Indonesia merasakannya salah satu contoh di Kabupaten Buru.

Tambang emas pertama kali ditemukan pada bulan November 2011 oleh Suyono seorang petani SP2, Desa Debowae Kecamatan Waeapo. Temuan tersebut pertama kali diketahuinya lewat mimpi, kemudian bersama tiga rekannya yaitu Saing Bugis, Lalaban Bugis, dan Susiono, menuju lokasi sungai Anoni Dusun Wamsait, Desa Dafa dan selama empat hari mendulang mereka berhasil mendapatkan empat gram emas murni. Lokasi tersebut ditempati masyarakat Marga Adat Besan, Wael dan Nurlatu dan berada di wilayah Petuanan Kayeli.

²Wirawan, "*Konflik dan Manajemen Konflik*" Teori Aplikasi dan Penelitian 2013, Hal: 63. 9 Desember 2015

Masyarakat sekitar mulai berdatangan ke lokasi untuk mendulang dan dipungut biaya sebesar Rp 100.000 per orang oleh masyarakat marga adat.

Dalam perjalanannya timbul sengketa di antara para pemungut karcis masuk yaitu antara Marga Adat Wael dan Besan, sehingga lokasi tambang emas di tutup sementara waktu selama ½ minggu untuk mengantisipasi konflik antar marga tersebut, dan timbulah tuntutan dari Masyarakat Adat untuk membuka kembali lahan tambang emas, dan pada tanggal 31 Desember 2011 diadakan pertemuan antara Bupati Buru (Husni Hentihu) dengan Masyarakat Adat dan diberi kesempatan untuk dibuka kembali sampai tanggal 2 february 2012 (akhir jabatan bupati). Dan pada akhir Januari para penambang liar mencapai jumlah yang fantastik sebanyak 15 ribu penambang liar dari berbagai daerah di Indonesia. Dampak yang terlihat dari semakin banyaknya para penambang ilegal ini sehingga menyebabkan konflik dengan intensitas yang sangat besar yang terjadi antara dua kelompok yaitu masyarakat Ambalau dengan masyarakat Marga Adat Nurlatu yang mengakibatkan korban tewas sebanyak 21 orang dan korban luka-luka sebanyak 44 orang. Berbicara mengenai konflik yang terjadi di lokasi pertambangan emas Gunung Botak setelah dibuka pada penghujung tahun 2011 hingga 2015 ini tercatat ada konflik dengan intensitas (Ringan, sedang dan Besar) sebanyak 26 kali dan telah mengakibatkan korban tewas sebanyak 578 orang dan Korban Luka-luka 900 orang lebih.³

Pemerintah telah mengatur kegiatan pertambangan tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 yang kemudian di lahirkan

³Makalah Kepolisian Daerah Maluku Resort Pulau Buru tentang Sosialisasi Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, 9 desember 2015

kembali dengan keberadaan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua Undang - undang tersebut sama-sama mengatur tentang pengelolaan bahan galian dan sistem pengelolaannya. pengelolaan bahan galian dalam UU Nomor 4 tahun 2009 diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan mineral dan batubara.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah tetap mempunyai peran yang sangat besar, oleh karena itu untuk menjaga agar alam yang sudah rusak dan terganggu keseimbangannya ini agar tidak menjadi semakin rusak, diperlukan ketegasan dari pihak pemerintah selaku regulator untuk menerbitkan regulasi yang mampu mencegah terjadinya PETI (pertambangan Ilegal) terutama cukong atau pemilik modal, karena tanpa pemilik modal para penambang tidak akan bisa bekerja serta diperlukan kesadaran dari para pelaku PETI bahwa apa yang mereka lakukan hanya mendatangkan sedikit keuntungan bagi mereka tetapi mendatangkan kerugian yang besar bagi alam dan manusia yang efeknya bisa berlangsung bertahun-bertahun bahkan berpuluh-puluh tahun.

Dalam meminimalisir konflik yang terjadi, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Maluku Nomor 522-1 tahun 2012 tentang penutupan kegiatan pertambangan dan penanganan penataan kawasan Gunung Botak di Kabupaten Buru. Kemudian ditindak lanjuti oleh Bupati Buru melalui Instruksi Bupati Nomor 1/2012 tentang penutupan kegiatan penambangan dan penanganan penataan kawasan gunung botak di Kabupaten Buru, melalui tiga Metode yakni: Pre-emptif, Preventif, dan Represif,⁴

⁴Data dari Kepolisian Polres Pulau Buru. Di akses pada tanggal 8 Desember 2015

Penutupan areal tambang emas ilegal Gunung Botak yang aktivitasnya kebanyakan dilakukan penambang dari luar Maluku, sudah berulang kali dilakukan, bahkan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Pulau Buru, November 2015 juga telah menginstruksikan penutupan lokasi tambang tersebut karena telah terjadi kerusakan lingkungan.

Dalam Pertemuan tertutup yang dihadiri Pangdam XVI/Pattimura Mayjen Dony Monardo, Bupati Buru Ramly Umasugi, Kadis Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, Martha Nanlohy, serta sejumlah instansi teknis terkait dan tokoh masyarakat Pulau Buru, membahas berbagai langkah pengamanan terkait keputusan penutupan lokasi pertambangan ilegal yang telah berlangsung sejak empat tahun terakhir tersebut dan akhirnya menemui kata sepakat. Pada tanggal 18 November 2015, Gubernur Maluku resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait penutupan aktivitas di area pertambang emas yang selama ini dilakukan secara ilegal di Gunung Botak Desa Wamsait, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Maluku, terkait penutupan area pertambangan emas di Gunung Botak karena dinilai dampak yang terjadi sudah sangat besar baik dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan dan maupun sisi keamanan yang mana sering terjadi konflik antar penambang emas ilegal.

Pemerintah Daerah mengeluarkan Instruksi Bupati No. 1/2012 sebagai turunan dari Instruksi Gubernur No. 522-1 tahun 2012 tentang penutupan areal pertambangan dikarenakan berbagai dampak yang terjadi di area pertambangan. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya dari segi konfliknya saja tetapi dari segi kesehatan, keamanan, maupun lingkungan juga menjadi acuan Pemerintah Daerah

untuk segera menutup area pertambangan. Dan dampak social yang ditimbulkan dari adanya penambangan emas di Gunung Botak dapat dilihat dari beberapa sisi, diantaranya dari sisi ekonomi, kesehatan, keamanan, dan lingkungan.

Dari sisi ekonomi, harga barang melonjak melebihi standar harga yang berlaku. Kajian ekonomi regional propinsi maluku triwulan I – 2012, empat imbas yang timbul akibat ditemukannya tambang emas di Buru, antara lain :*Pertama, peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor pertambangan.* Hasil dari penambangan emas yang menggiurkan dan menghasilkan uang dalam waktu relatif singkat dibandingkan dengan bertani membuat banyak masyarakat yang meninggalkan sawah dan ladang untuk pergi ke area penambangan emas. Kedua, *Penduduk Buru terancam kekurangan pasokan beras karena produksi yang menurun.* Mengacu pada perhitungan, Bulog berencana membeli 4000 ton/tahun untuk didistribusikan ke wilayah Maluku. Namun saat ini kondisi terbalik 180 derajat, Buru menjadi daerah yang kekurangan beras. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Bulog Maluku menyuplai raskin dari Ambon ke Buru. Sejak bulan Januari 2011 sebanyak 1700 ton raskin dari gudang di Ambon sudah dikirim ke Pulau Buru. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya Buru merupakan pemasok raskin ke Ambon yang didistribusikan ke wilayah Maluku. Keempat, *terdapat persaingan antara Bulog dan para penambang untuk mendapatkan beras yang terbatas.* Bulog Maluku membeli beras dari para petani dengan harga Rp. 6.600,00/kg sedangkan para penambang yang memiliki daya beli di atas rata-rata yakni sebesar Rp. 8.000,00/kg. Menurut catatan Bulog, dari target pembelian

sebanyak 4000 ton pada tahun 2012, sampai triwulan I-2012, Bulog mendapatkan 65 ton.⁵

Dari sisi kesehatan salah satunya, virus mematikan: HIV/AIDS teridentifikasi di Pulau Buru, empat pekerja seks komersial (PSK) diketahui positif mengidap HIV. Kondisi ini mendapat perhatian serius pemerintah Kabupaten Buru yang langsung melakukan berbagai Sosialisasi pencegahan penularan virus tersebut. Pemerintah bersama aparat kepolisian juga melakukan razia di hotel dan penginapan yang ada di Pulau Buru. Limbah mercury yang sudah diluar ambang batas toleransi akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan secara luas terhadap masyarakat Kabupaten Buru, terlebih khusus lagi mereka yang terkontaminasi limbah tersebut. Kesulitan penambang memperoleh air bersih dan penambangan dilakukan sehari-hari tanpa memperhatikan kesehatan, para penambang banyak yang menderita penyakit kulit.

Dari sisi keamanan, sering terjadi bentrokan antar Masyarakat Adat dan masyarakat penambang. Tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah pertambangan yang penyelesaiannya tidak dilakukan secara tuntas membuat kekhawatiran masyarakat sekitar.

Dari sisi lingkungan, daerah Gunung Botak menjadi rawan longsor karena adanya penggalian-penggalian lubang untuk pertambangan. Banyak pohon yang ditebang/dirusak untuk keperluan para penambang membuat tenda dan membuat lubang tambang, daerah yang mulanya merupakan ekosistem hutan berubah

⁵ Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Triwulan I – 2012, Boks 1 Imbas Penemuan Tambang Emas Di Pulau Buru, di akses tanggal 9 November 2015

menjadi lubang tambang yang ditinggalkan penambang tanpa dilakukan rehabilitasi hal ini sangat merusak lingkungan.

Hilangnya ekosistem hutan yang berganti menjadi daerah pertambangan telah menghilangkan fungsi ekosistem hutan sebagai pertukaran energy (*energy circuits*), siklus hidrologi, rantai makanan makhluk hidup, mempertahankan keanekaragaman hayati, daur nutrient dan pengendali ketika terjadi pencemaran. Kerusakan ekosistem hutan berdampak pada ketidakseimbangan sistem alam. Sungai yang mulanya bersih menjadi kotor dan tercemar limbah beracun (mercury).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas peneliti mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui “Analisis Konflik Kepentingan dan Manajemen Konflik dalam Penambangan Emas Di Pulau Buru Tahun 2011-2015 maka dapat dirumuskan masalah sebagai Berikut:

1. Bagaimana konflik kepentingan di areal pertambangan Gunung Botak Kabupaten Buru?
2. Bagaimana proses tahapan manajemen konflik dalam mengatasi konflik di areal tambang?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konflik kepentingan pertambangan emas Gunung Botak.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses manajemen konflik dalam mengatasi konflik di area tambang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan baik dari aspek teoritis maupun praktis.

- 1) Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penambahan khazanah keilmuan mata kuliah dan consensus terutama berkenaan dengan implementasi kebijakan peraturan daerah dan manajemen konflik.
- 2) Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan rujukan baik bagi praktisi sosial, politisi, maupun pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan public dan manajemen konflik.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori yang dimaksudkan di sini adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan analisa deskriptif suatu fenomena agar menjadi lebih jelas dan sistematis serta ilmiah dalam menjelaskan kejanggalan di lapangan. Seperti halnya yang dikatakan Masri Singarimbun bahwa teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan proposisi yang menerangkan suatu fenomena social, sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁶ Dengan kata lain teori adalah sarana untuk menyatukan hubungan sistematis antara fenomena

⁶Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi, "*Metode Penelitian Survey*", Jakarta: LP3ES, 1989, hal 37.

social-politik atau alam. Dalam penelitian di gunakan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran, yakni:

1. Teori Konflik

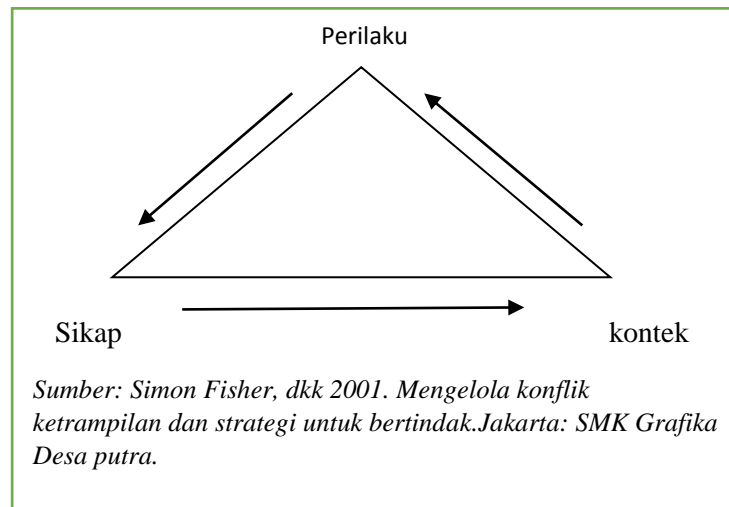
1.1 Definisi Konflik

Dilihat dari sejarah umat manusia, konflik sesungguhnya bukanlah hal yang baru, keberadaan konflik setara dengan peradaban manusia. Sejarah mencatat bahwa konflik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, sepanjang seseorang masih hidup hampir mustahil untuk menghilangkan konflik di muka bumi ini baik itu konflik antar individu maupun kelompok. Jika konflik antara perorangan tidak bisa diatasi secara adil dan profesional, maka hal itu dapat berakhir dengan konflik antar kelompok. Untuk itu, konflik merupakan suatu gejala yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat. Fenomena konflik tersebut mendapat perhatian bagi manusia, sehingga muncul penelitian-penelitian yang menciptakan dan mengembangkan berbagai pandangan tentang konflik.

Pengertian konflik menurut Johan Galtung konflik merupakan sebagai benturan fisik dan verbal dimana akan muncul penghancuran. Konflik sebagai sekumpulan permasalahan yang menghasilkan penyelesaian yang merupakan penciptaan baru. Menurut Johan Galtung, konflik dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Kontradiksi, sikap dan perilaku. Untuk menggambarkan kejadian konflik di kecamatan Waeapo, yaitu Dusun Wamsait, berdasarkan dengan teori segitiga konflik sebagai berikut:⁷

⁷ Fischer, Simon dkk. 2001. *"Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk bertindak"* Jakarta: British Council. Hal: 6. Di akses pada bulan Maret 2016.

Gambar 1.1 Segitiga SPK



Sikap merupakan tingkah laku dari individu atau kelompok atau organisasi yang berkonflik. Sikap seseorang atau masyarakat tersebut terdapat sifat atau sikap yang memicu timbulnya konflik. Perilaku yaitu tindakan atau perbuatan seseorang, kelompok atau organisasi yang juga menimbulkan konflik. Sedangkan kontradiksi atau konteks adalah kemunculan situasi dan kondisi dari perilaku dan sikap seseorang, kelompok atau organisasi. Jadi antara sikap perilaku dan konteks ini akan terus bergantian dan melahirkan problem-problem sosial.⁸

Pemetaan konflik dilakukan dengan mengelompokkan ke dalam Ruang-ruang konflik. Kriteria-kriteria ruang konflik tersebut menurut Fuad & Maskanah terbagi kedalam 5 ruang konflik yakni:⁹

1. *Konflik data*, terjadi ketika seseorang mengalami kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, mendapat informasi yang salah, tidak sepakat mengenai data yang relevan,

⁸George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *“Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern”*, (Yogyakarta: kreasi Wacana) 2011. Hal :83

⁹Fuad, F. H & S. Maskanah. *“Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Hutan”*, Pustaka LATIN. Bogor 2000. Hal :16

menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda.

2. *Konflik kepentingan*, disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik kepentingan terjadi karena masalah yang mendasar atau substansif (misalnya uang dan sumberdaya) masalah tatacara (sikap dalam menangani masalah) atau masalah psikologi (persepsi atau rasa percaya, keadilan rasa hormat).
3. *Konflik hubungan antar manusia*. Terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang berulang (repetitif). Masalah-masalah ini sering menimbulkan konflik yang tidak realistis atau yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
4. *Konflik nilai* disebabkan oleh sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian baik yang hanya dirasakan maupun memang nyata.
5. *Konflik struktural*, terjadi ketika adanya ketimpangan untuk melakukan akses dan control terhadap sumber daya, pihak yang berkuasa dalam dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, biasanya memiliki peluang untuk meraih akses dan melakukan control sepihak terhadap pihak lain.

Dalam konteks ini, konflik sesungguhnya dapat dipahami dalam 2 perspektif yang berbeda. Pertama, konflik dapat dianggap sebagai sebuah patologi sosial akibat kegagalan sebuah proses integrasi suatu masyarakat atau komunitas. Patologi sosial dapat sangat mungkin terjadi apabila kepentingan golongan, kelompok, atau komunitas di atas kepentingan bersama mencuat. Kedua, konflik ini dilihat dari segi “fungsional”-nya yakni sebuah mekanisme untuk

menyempurnakan proses integrasi sosial. Dalam pemahaman ini konflik dipandang sebagai sebuah cara untuk menghilangkan berbagai elemen disintegrasikan dalam rangka untuk membentuk suatu komunitas yang solid.

1.2 Jenis-jenis Konflik

Konflik banyak jenisnya, dan dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Sebagai contoh, konflik dapat dikelompokkan menjadi berdasarkan latar terjadinya konflik, pihak yang terkait dalam konflik, dan substansi konflik. Konflik dibedakan menjadi dua yaitu, (Konflik Konstruktif dan Konflik Destruktif) dan (Konflik realitas dan Konflik Non Realitas).

a) Konflik Realitas dan Konflik Non Realitas.

Menurut Lewis Coser seperti dikutip oleh Joseph P. Flogerdan Marshal S. Poole (1984) mengelompokkan konflik menjadi konflik realitas dan konflik non realitas.

1. Konflik realitas, konflik yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksepahaman cara pencapaian tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai. Dalam konflik jenis ini interaksi konflik memfokuskan pada isu ketidaksepahaman mengenai substansi atau objek konflik yang harus diselesaikan oleh pihak yang terlibat konflik. Disini, metode manajemen konflik yang digunakan adalah dialog, persuasi, musyawarah, voting dan negosiasi. Kekuasaan dan agresi sedikit sekali digunakan.
2. Konflik non realistis, Konflik yang terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik. Konflik ini dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi

untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Penyelesaian perbedaan pendapat mengenai isu penyebab konflik tidak penting. Hal yang penting adalah bagaimana mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, metode manajemen konflik yang digunakan adalah agresi, menggunakan kekuasaan, kekuatan dan paksaan. Contoh jenis konflik ini adalah konflik karena perbedaan suku dan ras, yang sudah menimbulkan kebencian yang mendalam.¹⁰

b) Konflik Destruktif dan Konflik Konstruktif

Konflik juga dapat dikelompokkan menjadi konflik konstruktif (konflik produktif) dan konflik destruktif (konflik kontraproduktif).

1. Konflik Konstruktif

Konflik konstruktif adalah konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik konflik jenis ini membangun sesuatu yang baru atau mempererat hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik; ataupun mereka memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari konflik. Pihak-pihak yang terlibat konflik secara fleksibel menggunakan berbagai teknik manajemen konflik, seperti negosiasi give and take, humor, bahkan voting untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

2. Konflik Destruktif

Dalam konflik destruktif, pihak-pihak yang terlibat konflik tidak fleksibel atau kaku karena tujuan konflik di definisikan secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain. Interaksi konflik berlarut-larut, siklus konflik tidak terkontrol karena menghindari isu konflik yang sesungguhnya.

¹⁰Wirawan, "Konflik dan Manajemen Konflik" Teori Aplikasi dan Penelitian 2013. Hal:59.

Konflik destruktif sulit diselesaikan karena stakeholder ini berupaya saling menyelamatkan muka mereka.¹¹

Tabel 1.1
Karakteristik Konflik Konstruktif dan Desktruktif¹²

Konflik Konstruktif	Konflik Desktruktif
<ul style="list-style-type: none"> • Berusaha menyelesaikan perbedaan mengenai substansi konflik. • Berhasil mendefinisikan dan mengklarifikasi permasalahan konflik • Komunikasi dan negosiasi insentif untuk menjelaskan posisi masing-masing • Berupaya mengendalikn emosi, marah kekhawatiran, dan stress. • Negosiasi Give and take • Spiral konflik mengerucut kearah kompromi atau kolaborasi • Berupaya mencari win & win solution yang memuaskan kedua belah pihak yang terlibat konflik 	<ul style="list-style-type: none"> • Polarisasi perbedaan • Berkurangnya kerjasama • Konflik tidak berpusat pada substansi konflik • Terjadi spiral konflik yang makin membesar dan meninggi • Perilaku merendahkan lawan konflik • Perilak mengancam • Perilaku konfrontasi dan mengancam • Ketegangan, kekhawatiran, stress, dan agresi • Negosiasi minimal • Gaya manajemen konflik kompetisi • Mengalami krisis • Menginginkan win & win solution • Merusak hubungan • Menyelamatkan muka

c) Konflik Fungsional dan Konflik Disfungsional

Berdasarkan fungsinya, Robbins (1996:430) membagi konflik menjadi dua yaitu konflik fungsional (FunctionalConflict) dan konflik disfungsional (Dysfunctional Conflict)

1. Konflik fungsional

Konflik Fungsional adalah konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok konflik fungsional bersifat konstruktif dan membantu dalam

¹¹Ibid Hal: 60-62

¹² Op cit hlm 22 - 23

meningkatkan kinerja organisasi. Konflik ini mendorong orang untuk bekerja lebih keras bekerjasama dan lebih kreatif. Konflik ini berdampak positif atau dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi organisasi yang bersangkutan.

2. Konflik Disfungsional

Konflik disfungsional adalah konflik yang merintangai pencapaian tujuan kelompok. Konflik disfungsional bersifat destruktif dan dapat menurunkan kinerja organisasi. Konflik disfungsional dapat diartikan setiap konfrontasi atau interaksi diantara kelompok yang merugikan organisasi atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi.

1.3 Tujuan Konflik

Secara umum tujuan konflik adalah. Pertama, dimaksudkan untuk mendapatkan sumber-sumber daya tertentu. Salah satu dari banyak ciri manusia hidup adalah manusia membutuhkan dan memerlukan sumber-sumber daya yang bersifat material-jasmania maupun spiritual-rohania untuk dapat hidup secara layak. Usaha untuk memperoleh sumber-sumber daya tersebut diantaranya adalah dengan cara berkonflik, baik melalui tindakan yang positif (berkompetisi) atau dengan negatif (agresi terhadap hak milik orang lain). Kedua, tujuan konflik adalah untuk mempertahankan sumber-sumber daya yang selama ini telah di milikinya. Dalam konteks ini manusia berusaha untuk memelihara sumber-sumber daya yang telah jadi milik mereka dan cara mempertahankanya dari orang-orang ataupun pihak lain yang ingin merebutnya.

2. Manajemen Konflik

Secara teoritis menurut Ross (1993), manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan kearah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik. Di samping itu, mungkin atau tidak mungkin dapat menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif.¹³

Menurut Teori Ross, ada 2 metode manajemen konflik dalam menyelesaikan konflik, yang pertama: mengurangi konflik, dan penyelesaian secara kongkrit yakni:¹⁴

1. Mengurangi konflik, dalam metode pengurangan konflik, salah satu cara yang sering efektif adalah dengan mendinginkan persoalan terlebih dahulu (cooling thing down). Meskipun demikian cara semacam ini sebenarnya belum menyentuh persoalan yang sebenarnya.
2. Penyelesaian secara kongkrit, dalam metode ini merupakan penyelesaian konflik secara tuntas. Konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan persoalan yang bisa dipecahkan dengan bantuan pihak ketiga.

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan

¹³ Winardi, "*Manajemen Konflik Perubahan dan Pengembangan*". (Bandung: Mandar Maju, 1994), Hal:9-10

¹⁴ Ibid. Hal:10

bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi. Bagi pihak luar (diluar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.¹⁵

Sementara Minnery menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses, sama halnya dengan perencanaan kota. Minnery juga berpendapat bahwa, proses manajemen konflik perencanaan kota merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif, artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan kota secara terus menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal.¹⁶Sama halnya dengan proses manajemen konflik yang telah dijelaskan diatas, bahwa manajemen konflik perencanaan kota meliputi beberapa langkah yaitu: penerimaan terhadap keberadaan konflik (dihindari atau ditekan/didiamkan), klarifikasi karakteristik dan struktur konflik, evaluasi konflik (jika bermanfaat maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya), menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik, serta menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam mengelola konflik.

Pengelolaan Konflik dapat dicegah atau dikelola dengan:

- a. Disiplin, mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Manajer perawat harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk memahaminya.

¹⁵ Ibid. Hal :15

¹⁶ Wirawan, 2013, "Konflik dan Manajemen Konflik" Teori, Aplikasi, dan Penelitian Jakarta: Salemba Humanika. Hal : 166. Diakses pada 17 Mei 2016

- b. Pertimbangan Pengalaman dalam Tahapan Kehidupan, Konflik dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Misalnya; Perawat junior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, sedangkan bagi perawat senior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.
- c. Komunikasi, Suatu Komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terapan dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari yang akhirnya dapat dijadikan sebagai satu cara hidup.
- d. Mendengarkan secara aktif, mendengarkan secara aktif, merupakan hal penting untuk mengelola konflik. Untuk memastikan bahwa penerimaan para manajer perawat telah memiliki pemahaman yang benar, mereka dapat merumuskan kembali permasalahan para pegawai sebagai tanda bahwa mereka telah mendengarkan.

Manajemen konflik dimaksudkan sebagai sebuah proses terpadu (intergrated) menyeluruh untuk menetapkan tujuan organisasi dalam penanganan konflik, menetapkan cara-cara mencegahnya program-program dan tindakan sebagai tersebut maka dapat ditekankan empat hal :

1. Manajemen konflik sangat terkait dengan visi, strategi dan sistem nilai/kultur organisasi manajemen konflik yang diterapkan akan terkait erat dengan ketiga hal tersebut.

2. Manajemen konflik bersifat proaktif dan menekankan pada usaha pencegahan. Bila fokus perhatian hanya ditujukan pada pencarian solusi-solusi untuk setiap konflik yang muncul, maka usaha itu adalah usaha penanganan konflik, bukan manajemen konflik.
3. Sistem manajemen konflik harus bersifat menyeluruh (corporate wide) dan mengingat semua jajaran dalam organisasi. Adalah sia-sia bila sistem manajemen konflik yang diterapkan hanya untuk bidang Sumberdaya Manusia saja misalnya.
4. Semua rencana tindakan dan program-program dalam sistem manajemen konflik juga akan bersifat pencegahan dan bila perlu penanganan. Dengan demikian maka semua program akan mencakup edukasi, pelatihan dan program sosialisasi lainnya.

Tujuan manajemen konflik adalah suatu fenomena yang sering kali tidak bisa dihindari dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Sumber-sumber organisasi, sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya teknologi dan digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik bukan untuk meningkatkan kreatifitas organisasi. Oleh karena itu, manajemen konflik harus dilakukan secara sistemis untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷

3. Pertambangan

Pertambangan merupakan suatu aktivitas penggalian, pembongkaran serta pengangkutan suatu endapan mineral yang terkandung dalam suatu area berdasarkan beberapa tahapan kegiatan secara efektif dan ekonomis dengan

¹⁷ Wirawan, 2013, "Konflik dan Manajemen Konflik" Teori, Aplikasi, dan Penelitian Jakarta: Salemba Humanika. Hal: 132. Di akses pada 16 Mei 2016.

menggunakan peralatan mekanis serta beberapa peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal (1) butir dsisebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.¹⁸

Pertambangan merupakan sumber daya alam yang termasuk kedalam kelompok stok, dimana sumber daya alam ini dianggap memiliki cadangan yang terbatas sehingga eksploitasi terhadap sumber daya alam tersebut akan menghabiskan cadangan sumber daya alam yang ada. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien akan mengurangi persediaan dimasa mendatang. Sumberdaya ini disebut dengan sumberdaya yang tidak dapat diperbarui (*nonnewablere*) atau terhabiskan (*exhaustible*).¹⁹

Sukandarrumidi (2010) menambahkan semakin besar skala kegiatan pertambangan, semakin besar pula areal dampak yang di timbulkan. Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula.

Pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan atau wilayah. Potesi kerusakan tergantung dari berbagai faktor

¹⁸Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

¹⁹Fauzi, A. 2004. "*Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal: 35

kegiatan pertambangan antara lain pada teknik pertambangan, pengelolaan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna dan flora, hidrologis, dan lain-lain.

Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran permukaan dan air tanah dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya ekonomi. Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan yang berubah atau meniadakan fungsi-fungsi lingkungan (Nurdin et. Al. 2000).

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu pengertian untuk menjelaskan terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini guna menghindari adanya kesalahpahaman pengetahuan, istilah yang digunakan dalam proposal ini. Adapun pengertian yang ingin dijabarkan dalam definisi konseptual ini adalah:

1. Konflik

Konflik merupakan situasi sosial yang terjadi ketika dua atau lebih actor mengejar tujuan feed back yang eksklusif atau tidak sesuai. Dengan kata lain ada tiga komponen konflik yang sangat penting yang berkaitan dengan merebaknya konflik. Pertama, ada pihak-pihak yang bersengketa. Kedua, ada ketidaksepahaman. Ketiga, ada tindakan.

2. Manajemen Konflik

Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (interest) dan interpretasi.

3. Pertambangan

Pertambangan merupakan suatu aktivitas penggalian, pembongkaran serta pengangkutan suatu endapan mineral yang terkandung dalam suatu area berdasarkan beberapa tahapan kegiatan secara efektif dan ekonomis dengan menggunakan peralatan mekanis serta beberapa peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

G. Definisi Operasional

Merunut pada definisi konseptual di atas, maka peneliti ingin menjelaskan bagaimana operasionalisasinya dan telah dijabarkan dalam penelitian "*Analisis Konflik Kepentingan dan Manajemen Konflik dalam Penambangan Emas di Pulau Buru tahun 2011-2015*". Adalah sebagai berikut:

Untuk mengukur konflik kepentingan penulis menggunakan teori konflik Johan Galtung, dan untuk menganalisis manajemen konflik, penulis menggunakan Teori Ross dalam mengatasi konflik. Ada tiga bagian yaitu: kontradiksi, sikap, perilaku. Untuk menggambarkan kejadian konflik di area pertambangan Gunung Botak berdasarkan segitiga konflik berikut ini:

1. Analisis Konflik di lihat dari aspek Segitiga SPK (Segitiga, Perilaku, Kontradiksi):
 - a. Sikap.
 - 1) Klaim Kepemilikan Tanah
 - 2) Adanya Dominasi Lahan Tambang
 - b. Perilaku.
 - 1) Konflik Kebijakan Pertambangan
 - c. Kontradiksi.
 - 1) Konflik pengelolaan Kepentingan di area tambang Emas.
2. Konsep Manajemen Konflik dalam Mengatasi Konflik di Area Tambang Emas.
 - a. Teori Ross dalam mengatasi konflik di area tambang.

H. Metode Penelitian

Metodelogi merupakan arah yang menuntun peneliti dalam berfikir. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Winarno Surachman dalam pengantarnya tentang *Tehnik Research*, bahwasanya metodelogi sebagai tuntunan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah²⁰. Adapun metode yang nantiya digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu merupakan perincian terhadap suatu latar atau satu

²⁰Winarno Surachman, "*Suatu Pengantar Dasar dan Tehnik Research*", Bandung, CV Tarsito, hal, 39.

orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau peristiwa pada penelitian ini. Dalam hal ini penulis berupaya untuk menganalisis konflik yang terjadi di area pertambangan di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan Kabupaten Buru Provinsi Maluku sebagai objek penelitian. Penetapan lokasi ini disesuaikan dengan tujuan penelitian.

3. Unit Analisa

Dalam penelitian yang diteliti, bisa suatu individu atau bisa juga suatu kelompok. Unit analisa dalam penelitian ini adalah Lokasi Pertambangan Gunung Botak Desa Wamsait Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru.

4. Jenis dan Sumber Data

Selain daripada itu dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan data utama atau data primer dan untuk mendukung kevalidan data dari penelitian maka digunakan pula data pendukung atau data sekunder. Berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data tambahan dengan menggunakan bahan-bahan yang dianggap relevan diperoleh dari Buku-Buku, Literature dan Peraturan Perundang-undangan atau Dokumentasi lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data Sesuai dengan metode penelitian serta jenis penelitian yang penulis kemukakan, maka untuk mendapatkan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat utama untuk pengumpulan data dan juga informasi objek yang diteliti, metode ini digunakan untuk mewawancarai secara langsung dengan responden.²¹

Untuk memenuhi data yang dibutuhkan, peneliti akan mewawancarai:

1. Pemerintah Daerah
 - a) Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Buru (Ir. Masri)
 - b) Kepala bagian Bagian Hukum SetDa Kabupaten Buru (Ridwan Bega SH)
 - c) Anggota DPRD Kabupaten Buru (Hatija Hukul)
2. Pihak yang terlibat Konflik
 - a) Masyarakat Adat (As Kaina)
 - b) Masyarakat Ambalau (Azmun Diman)

²¹Lexi Moleong. 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- c) Para Penambang emas (Kamel Hatala)
3. Tokoh-Tokoh Adat Pulau Buru (Jafar Nurlatu)
4. Kepolisian Polres Kabupaten Buru. (Adi Nugroho SH)
5. Kapolsek Waeapo Kabupaten Buru (Mochtar Wamnebo)

Dalam memenuhi data yang dibutuhkan, Penulis telah mewawancarai sembilan (9) aktor yang berkaitan dengan pengelolaan konflik di Kabupaten Buru.

b. Dokumentasi

Secara teoritis dokumentasi dapat di artikan sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan perkiraan terhadap peristiwa itu.²²Selanjutnya secara alamiah teknik dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku-buku ataupun tulisan-tulisan yang mencatat terkait permasalahan-permasalahan di dalam penelitian ini.

c. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan Observasi yang tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan sendiripengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan secara riil. Observasi yang peneliti lakukan dengan melihat langsung Peran Pemerintah dan Pengelolaan Konflik Kepentingan di tambang emas Pulau Buru.

²²Winarno Surachman, "Suatu Pengantar Dasar dan Tehnik Research", Bandung, CV Tarsito,.Hlm: 134

6. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan baik sewaktu mengumpulkan data maupun setelah pengumpulan data. Untuk melakukan analisis data hasil penelitian dilakukan dengan memadukan data hasil wawancara dan dokumentasi, maka digunakan analisis data kualitatif-naturalistik.